

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang saat ini adalah aset suatu organisasi/perusahaan untuk mencapai tujuan serta menetapkan teknologi informasi sebagai penunjang dari setiap proses kemajuan organisasi/perusahaan (Analisis Audit Sistem Informasi Berbasis COBIT 5 Pada Subdomain APO11 Manage Quality, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi saat ini tidak hanya digunakan pada industri, institusi, maupun organisasi disektor bisnis maupun private, namun digunakan pula pada sektor publik. Salah satu sektor publik yang memakai teknologi informasi ialah pada lembaga kementerian negara. Bagi lembaga kementerian negara teknologi informasi ialah suatu kebutuhan guna mendukung proses pengelolaan manajemen sebuah instansi. Salah satu bentuk penerapan proses administrasi yang berbasis teknologi informasi dan aplikasi komputer pada kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya yaitu Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang professional dan berkualitas serta untuk peningkatan layanan kepegawaian. Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di Kabupaten Malang. Pengadilan Negeri Kepanjen memiliki jumlah pegawai sebanyak 44 (empat puluh empat) Pegawai, dimana seluruh data dan informasi mengenai kepegawaian terdapat didalam sebuah aplikasi.

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi berupa layanan informasi kepegawaian yang berbasis *web* terpadu. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dapat menyimpan informasi mengenai data-data pegawai, diantaranya adalah biodata, alamat, data keluarga, riwayat pekerjaan, pendidikan formal dan informal, riwayat diklat, penilain pegawai dan lain- lain selain itu juga aplikasi ini dapat digunakan untuk absensi. Setiap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI hanya perlu

mempunyai akun berupa NIP dan *password* untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Sampai saat ini aplikasi ini terus dikembangkan dan disempurnakan guna mempermudah dan mempercepat pelayanan tentang kepegawaian.

Pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam pelaksanaannya, seluruh data pegawai terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN. Agar mendapatkan sebuah layanan informasi yang baik maka perlu adanya tata kelola yang baik pula, termasuk didalamnya tata kelola SI/IT dan pelayanan *support* lainnya. Sampai saat ini instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SI/IT tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan, apa yang menjadi kekurangan serta apa solusi yang dapat diberikan. Dasar evaluasi diperlukan suatu kerangka kerja standar yang menjadi pedoman dalam menilai suatu pengelolaan SI/IT. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT), suatu standar yang diakui secara internasional dan direkomendasikan untuk penerapan tata kelola TI yang baik (Leni Novianda et al., 2014). COBIT 5 merupakan kerangka kerja yang umum dapat digunakan untuk semua standar perusahaan, baik komersial, perusahaan non profit atau sektor publik (Maya Nur Amalia et al., 2020).

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI selama ini belum memiliki standar tertentu dalam melakukan evaluasi terhadap sistem informasi kepegawaian. Selain itu juga belum pernah dilakukan evaluasi terhadap tata kelola pada sistem aplikasi. Untuk itu disusun sebuah penelitian tentang Analisis Audit Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI menggunakan framework Cobit 5.

## 1.2 Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang diteliti sehubungan dengan analisis COBIT 5 pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan audit sistem informasi kepegawaian berdasarkan kerangka kerja COBIT 5?
2. Bagaimana nilai *capability level* dan rekomendasi berdasarkan hasil audit untuk diberikan kepada instansi Mahkamah Agung RI?

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang diharapkan penulis dapat tercapai pada pembuatan skripsi ini diantaranya :

1. Mengetahui kondisi perfomansi tata kelola teknologi informasi pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dengan kerangka kerja COBIT 5.
2. Menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit sebagai dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Tatakelola teknologi informasi yang efektif akan memberikan manfaat yang positif terhadap instansi dan akan semakin mudah dalam pengelolaan manajemen, sehingga memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi dalam segala urusan kepegawaian. Selain itu dapat mengoptimalkan resiko dan penggunaan sumber daya.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Karena keterbatasan waktu penelitian ini dilakukan hanya pada satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung;
2. Kerangka COBIT 5 yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada domain *Deliver, Service, and Support* (DSS);
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan kapabilitas dari tata kelola teknologi informasi pada Aplikasi SIKEP.